

Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo

Communication Strategy in the Resistance Movement toward Komodo Island Relocation and Closure Issues

Rici Tri Harpin Pranata^{1,*}, Sarwititi Sarwoprasodjo², Arif Satria²

¹ Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia

² Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia

^{*}E-mail korespondensi: rici_pranata@apps.ipb.ac.id

Diterima: 13 Agustus 2021 | Disetujui: 09 September 2021 | Publikasi online: 28 September 2021

ABSTRACT

Komodo National Park (KNP) as a conservation area and a strategic national tourism area involves various actors/stakeholders with different roles and interests in its management. Communication analysis is important to create conditions of mutual understanding, so that KNP management can benefit to all parties. In 2019, the Governor of East Nusa Tenggara discussed the relocation of the community and the closure of Komodo Island, which caused tension in relations with various parties. This study aims to analyze the community's communication strategy in the resistance of relocation and closure of Komodo Island issues. This study uses qualitative methods through in-depth interviews, analysis of events and the SPEAKING Hymes method. The results of this study indicate that there are differences in stakeholder groups based on the level of influence and importance, as follows: crowd, context setter, subject and key player. This study also shows that the communication strategy carried out by the community with other stakeholders is mostly dialogical as a form of advocacy. The communication events analyzed show that the community is able to achieve its interests, but it requires enormous efforts and the mobilization of all the collective strengths of the community.

Kata kunci: *Advocacy, Communication strategy, Komodo National Park, SPEAKING, Stakeholder*

ABSTRAK

Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai kawasan konservasi dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) melibatkan beragam aktor/*stakeholder* dengan peran dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaannya. Analisis komunikasi merupakan hal penting untuk menciptakan kondisi saling pengertian, sehingga pengelolaan TNK dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Tahun 2019, Gubernur Nusa Tenggara Timur mewacanakan relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo, kemudian menimbulkan ketegangan hubungan dengan berbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis peristiwa dan metode SPEAKING Hymes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kelompok *stakeholder* berdasarkan tingkatan pengaruh dan kepentingannya, yaitu *crowd, context setter, subject* dan *key player*. Studi ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan masyarakat dengan *stakeholder* lain mayoritas secara dialogis sebagai bentuk advokasi. Peristiwa komunikasi yang dianalisis menunjukkan masyarakat mampu mencapai kepentingannya, namun diperlukan upaya besar dan pengerahan seluruh kekuatan kolektif masyarakat.

Kata kunci: *Advokasi, Strategi komunikasi, Taman Nasional Komodo, SPEAKING, Stakeholder*



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia.

E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan dan lingkungan (termasuk kawasan konservasi) seringkali menimbulkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan hasil yang terjadi (Glasbergen, 1995; Strzelecka, Rechciński, Tusznio, Akhshik, & Grodzińska-Jurczak, 2021). Pembangunan dalam perspektif komunikasi tidak memberi tempat yang sentral, setidaknya-tidaknya seimbang, kepada hak berekspresi untuk bersikap dan berpendapat secara terbuka kepada setiap kelompok di masyarakat (Lubis, 2018). Beberapa kebijakan yang tidak efektif dalam mencapai tujuan dapat ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (Nurrochmat, Darusman, & Ekayani, 2006). Di Indonesia, salah satu pendekatan pengelolaan konservasi bersifat sentralistik¹, dimana pendekatan tersebut memiliki kelemahan seperti mengakibatkan masyarakat terpinggirkan (Satria, 2009). Masyarakat di kawasan taman nasional sering diposisikan sebagai objek pengelolaan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan (Roslinda, Darusman, Suharjito, & Nurrochmat, 2012). Padahal, pelibatan aktor lokal penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menciptakan peluang yang lebih besar agar kebijakan dapat diterima secara sosial maupun politik (Bonsu et al., 2019).

Beberapa literatur menunjukkan konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat terjadi ketika kepentingan berbagai pihak/*stakeholder* tidak diakomodir (Cox, Butler, Webber, & Young, 2020; Hodgson, Redpath, Fischer, & Young, 2019; Juerges, Leahy, & Newig, 2020). Meski konflik merupakan bagian alami dari proses sosial, konflik dapat menunjukkan atau berkontribusi pada ketidakefisienan dan ketidakstabilan masyarakat (Scheffran, 2006), dan apabila konflik tidak tertangani dapat mengakibatkan pencapaian tujuan konservasi menjadi tidak efektif (Madden & McQuinn, 2014). Temuan Bonsu et al. (2019) menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan kepercayaan antar-*stakeholder* menjadi penyebab konflik dalam pengelolaan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang komunikasi juga telah memberi perhatian pada isu pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (Bessette, 2006; MacKeracher, Diedrich, Gurney, & Marshall, 2018), termasuk dalam pengelolaan konservasi (Margles, Peterson, Ervin, & Kaplin, 2010).

Tinjauan komunikasi penting untuk memahami proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan kearifan lokal untuk menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*) antara para pihak dalam pengelolaan konservasi (Ardian, 2019). Dalam tataran ideal, pengelolaan lingkungan (termasuk kawasan konservasi) perlu mengaplikasikan prinsip, strategi dan teknik komunikasi yang tepat (Bessette, 2006). Menurut Bessette (2006), praktisi pembangunan harus bekerja aktif dengan memfasilitasi dialog, pembelajaran, dan partisipasi aktif dalam inisiasi pengelolaan sumber daya alam bersama semua *stakeholder*. Disamping itu, Analisis peran *stakeholder* penting sebagai sarana untuk memperbaiki komunikasi, mendapat dukungan masyarakat, mengumpulkan data dan ide yang bermanfaat dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Susilo, Prayudi, & Erawati, 2016).

Salah satu kawasan konservasi yang dikelola secara sentralistik adalah Taman Nasional Komodo (TNK). Disamping sebagai kawasan konservasi, TNK dan sekitarnya juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (PP No. 50/2011). UU No. 5 (1990) menyebutkan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Beragam jenis pemanfaatan tersebut menandai adanya beragam kepentingan dalam pengelolaannya. Sejak penetapan sebagai KSPN, kepentingan para aktor/*stakeholder* semakin kompleks. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebut: Gubernur NTT) mewacanakan penutupan Pulau Komodo dan merelokasi masyarakat Pulau Komodo (Rosary, 2019; Wacana... 2019). Sejak muncul wacana tersebut, berbagai ketegangan antar-*stakeholder* mengemuka. Masyarakat juga menggelar aksi untuk memprotes wacana Gubernur NTT di beberapa tempat sebagai usaha membangun komunikasi agar kepentingan mereka tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan utama pada penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Kemudian untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, terdapat dua pertanyaan pendukung yang diajukan yaitu: 1) bagaimana kepentingan dan pengaruh *stakeholder*/para pihak dalam pengelolaan TNK? 2) bagaimana strategi komunikasi masyarakat kepada *stakeholder*/pihak lain dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo?

¹ Pendekatan sentralistik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat ditemui misalnya pada pengelolaan taman nasional yang berada di bawah rezim Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Satria, Muthohharoh, Suncoko, & Muflikhati, 2017). UU No. 5/1990 menyebutkan bahwa pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 34), sebagian urusan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pasal 38).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menganalisis strategi komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo, serta disampaikan tujuan pendukung untuk menjawab tujuan utama dengan menganalisis kepentingan dan pengaruh *stakeholder*/para pihak dalam pengelolaan TNK, dan menganalisis strategi komunikasi masyarakat kepada *stakeholder*/pihak lain dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan Juli-September 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, terutama pada gerakan komunikasi masyarakat sebagai bentuk advokasi mereka terhadap isu atau kebijakan rencana relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Sumber data menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi. Pengambilan data menggunakan strategi triangulasi (teknik pengambilan data, jenis data, dan informan penelitian). Informan dipilih menggunakan *snowball sampling*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis peristiwa yaitu peristiwa demonstrasi dan diskusi pasca demonstrasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat melalui wawancara, lalu memetakan dengan *matriks stakeholder* berdasarkan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) yang dianalisis melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Reed et al. (2009). Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2009).

Untuk melihat proses komunikasi *stakeholder* menggunakan metode Hymes (SPEAKING). Metode SPEAKING terdiri dari *Setting and scene*, *Participant*, *Ends*, *Act Sequence*, *Key*, *Instrumentalization*, *Norm*, dan *Genre*. *Setting and scene* untuk melihat tempat, waktu, dan aspek fisik saat berkomunikasi. *Participant* untuk menganalisis aktor yang terlibat dalam komunikasi, dijelaskan melalui umur, jenis kelamin, status sosial, hubungan dengan aktor lain. *Ends* adalah tujuan dan capaian dari komunikasi yang terjadi termasuk tujuan masing-masing individu aktor itu sendiri. *Act Sequence* merupakan urutan peristiwa komunikasi dilakukan dan topik-topik yang dibicarakan. *Key* merupakan nada atau sikap ketika berkomunikasi. *Instrumentalization* untuk menganalisis bentuk atau gaya komunikasi yang dilakukan (bahasa, dialek, lisan, tertulis). *Norm* merupakan aturan-aturan sosio-budaya ketika berinteraksi. *Genre* adalah bentuk komunikasi yang dilakukan (kuliah, puisi, sajak, surat, dll). Metode ini mampu melihat peristiwa komunikasi (penggunaan bahasa dan budaya, pola serta fungsi) untuk menyampaikan makna-makna sosial yang dipergunakan (ketika makna komunikasi dipertukarkan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Stakeholder* dalam Pengelolaan TNK**

Pengelolaan TNK melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dan saling mempengaruhi. Freeman (2015) menyebutkan bahwa kelompok individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu tujuan tertentu disebut pemangku kepentingan/*stakeholder*. *Stakeholder* dapat memberi atau terkena dampak kebijakan, program dan aktivitas pembangunan, bisa individu, kelompok sosial ekonomi atau lembaga. *Stakeholder* memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil dari suatu kegiatan (Kusumedi & Rizal HB, 2010). Pengertian *stakeholder* dalam penelitian ini adalah orang/kelompok orang atau kelompok/organisasi tertentu yang terlibat dalam pengelolaan TNK.

Menurut Bryant & Bailey (1997) aktor/*stakeholder* dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu negara, pengusaha, lembaga multilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktor akar rumput. Kelompok negara terdiri dari (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan tugas teknis pengelolaan TNK dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), (2) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan (3) Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores (LBF), serta (4) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat (DPRD Mabar) dan Kepolisian Labuan Bajo, dan (6) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar). Balai Taman Nasional Komodo merupakan *stakeholder* penting, memiliki tugas utama dalam mengelola Taman Nasional Komodo meliputi pemberdayaan masyarakat, penyediaan ijin pelayanan ekowisata, serta perlindungan kawasan dan hewan Komodo.

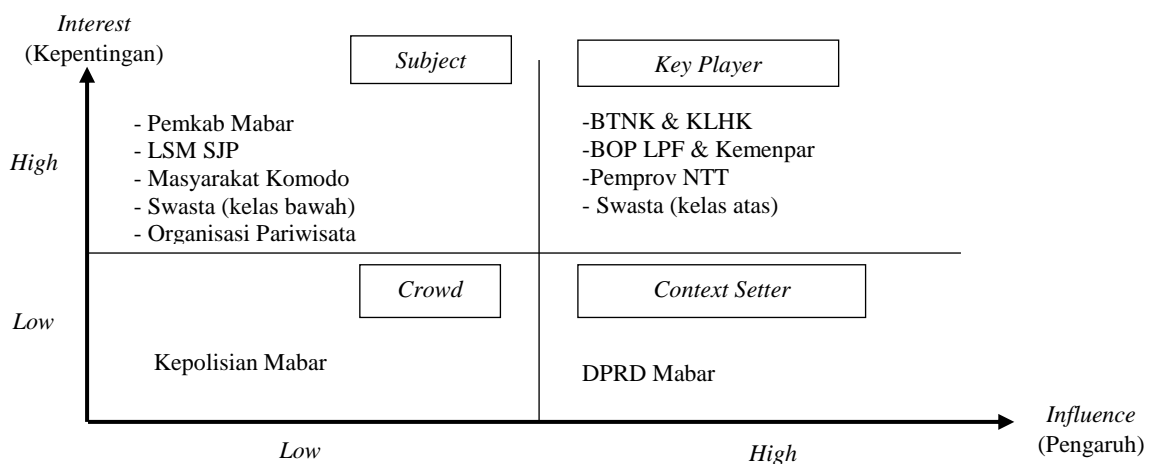
Stakeholder swasta bidang pariwisata meliputi pengusaha sarana akomodasi/hotel, pengusaha transportasi, pengusaha agen perjalanan/*tour*, restoran dan lain sebagainya. Pengelompokan swasta dibagi menjadi dua, yaitu swasta kelas atas yang memiliki modal yang besar meliputi pengusaha hotel berbintang, pemilik resor, bahkan investor asing maupun dalam negeri, dan sebagainya serta swasta kelas bawah dengan modal rendah hingga sedang, meliputi pengusaha kapal wisata kecil dengan standar rendah, para hotel tipe melati, dan sebagainya. Swasta memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu LSM *Sunspirit for Justice and Peace* memiliki peran pemberdayaan masyarakat dan mengawal advokasi atas isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. *Stakeholder* masyarakat menjadi pihak yang sangat tergantung pada kondisi Sumber Daya Alam di TNK. *Stakeholder* masyarakat pada penelitian ini merupakan Masyarakat yang berada Desa Komodo (sebut: Masyarakat Komodo) dan organisasi pariwisata yang dikelola oleh Masyarakat Komodo. Organisasi ini merupakan perhimpunan masyarakat Komodo yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata seperti penyedia *homestay*, pembuat *souvenir*, kuliner, *tour guide* dan sebagainya.

Analisis Pengaruh-Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengelolaan TNK

Setelah dilakukan identifikasi dan klasifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan TNK, selanjutnya pengelompokan dilakukan untuk melihat peran para *stakeholder* dalam pemanfaatan SDA di TNK. Pengelompokan *stakeholder* dibedakan menurut *influence* (pengaruh) dan *interest* (kepentingan). *Influence* (pengaruh) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran *stakeholder* dalam perumusan kebijakan (membuat, memfasilitasi dan mempengaruhi pihak pembuat kebijakan). Sementara *interest* (kepentingan) merupakan harapan, aspirasi dan manfaat yang diinginkan/didapatkan oleh *stakeholder*. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dikelompokkan berdasarkan derajat kepentingan dan pengaruh masing-masing, yaitu tinggi, sedang dan rendah (Eden & Ackermann, 2007; Grindle, 1998; ODA, 1995).

Kelompok *stakeholder* dengan derajat kepentingan tinggi memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas pengelolaan TNK. Kelompok derajat kepentingan sedang memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat potensial secara langsung dari pengelolaan TNK. Kelompok derajat rendah tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas pengelolaan TNK. Kelompok *stakeholder* dengan derajat pengaruh rendah memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Kelompok derajat pengaruh sedang memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Kelompok derajat pengaruh rendah tidak memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, *stakeholder* dikelompokkan menjadi empat kategori menurut Reed et al. (2009) yaitu (1) *key player* sebagai *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh dan derajat kepentingan yang tinggi; (2) *Context setter* yaitu *stakeholder* dengan derajat pengaruh tinggi namun derajat kepentingan sedang/rendah; (3) *Subject* merupakan *stakeholder* yang mempunyai derajat kepentingan yang tinggi namun derajat pengaruh sedang/rendah; dan (4) *Crowd* merupakan *stakeholder* dengan derajat pengaruh dan derajat kepentingan yang rendah.



Gambar 1. Matriks pengaruh-kepentingan *stakeholder*

Gambar 1 menunjukkan bahwa BTNK, BOP-LPF, Pemprov NTT, dan swasta kelas atas dalam *key player*. BTNK/KLHK memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi karena memiliki peran dalam menentukan kebijakan atas pengelolaan TNK, bertanggung jawab atas yang terjadi di kawasan TNK baik sosial, ekonomi, lingkungan, serta aktif memberdayakan masyarakat sekitar. BOP LBF termasuk sebagai *key player* karena memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pariwisata khususnya di kawasan TNK. BOP LBF dibentuk melalui (Perpres No. 32/2018), memiliki kepentingan akan pengembangan kondisi lingkungan, serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan pariwisata. Pemprov NTT memiliki kepentingan yang tinggi akan pengembangan kawasan TNK untuk pendapatan daerah. Pengaruh yang tinggi ditunjukkan dengan adanya isu relokasi Masyarakat Komodo dan penutupan Pulau Komodo. Melalui pernyataan Gubernur NTT, TNK ditingkatkan menjadi kawasan destinasi super premium, sehingga pembangunan fisik di kawasan TNK terus dilakukan. Adapun swasta kelas atas memiliki kepentingan tinggi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, juga mampu memengaruhi kebijakan pengelolaan. Aktor swasta kelas atas menjalin relasi dengan negara, bahkan masuk dalam struktur negara.

Stakeholder kelompok *subject* antara lain Pemkab Mabur, LSM SJP, Masyarakat Komodo, Organisasi Pariwisata, dan Swasta (kelas bawah). Pemkab Mabur sebagai implementor kebijakan juga memiliki kepentingan atas pendapatan daerah, namun memiliki pengaruh yang sedang sehingga dalam hal kebijakan masih terbatas. Swasta kelas bawah memiliki kepentingan yang tinggi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, namun memiliki pengaruh rendah. Organisasi pariwisata memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas pengelolaan TNK untuk usaha mereka. LSM Sunspirit memiliki kepentingan yang tinggi akan advokasi masyarakat di dalam kawasan, khususnya Masyarakat Komodo, namun tidak memiliki pengaruh dalam pembuatan ataupun mempengaruhi pihak *key player* dalam menentukan kebijakan.

Masyarakat Komodo sebagai *subject* sudah sejak lama berinteraksi dengan kawasan TNK. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, mereka sudah hidup berdampingan dengan hewan Komodo. Sebagai penerima manfaat, mereka memiliki harapan dan aspirasi yang tinggi atas terwujudnya pengelolaan yang baik di TNK. Sebagai ruang hidup masyarakat sekitar, pengelolaan TNK akan sangat menentukan kondisi masyarakat. Mereka memiliki pengaruh yang rendah karena tidak dapat menentukan kebijakan akan pengelolaan TNK.

Kelompok *context setter* adalah DPRD Mabur. DPRD Mabur memiliki pengaruh yang tinggi karena memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan di tingkat kabupaten, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Namun secara kepentingan, DPRD Mabur memiliki kepentingan yang sedang karena tidak menerima manfaat potensial secara langsung dari pengelolaan TNK. Kelompok *crowd* dalam penelitian ini adalah Kepolisian Labuan Bajo, memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah karena tidak memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Kepolisian Labuan Bajo memastikan keamanan dan ketertiban pengelolaan TNK terutama saat demonstrasi dilakukan oleh masyarakat

Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo

Dinamika kebijakan pengelolaan suatu kawasan dapat dilihat dari besarnya kepentingan *stakeholder* yang terlibat di dalamnya, dicirikan dengan beragamnya karakteristik dan orientasi dalam pengelolaan (Sabir, Avenzora, & Winarno, 2018). Para *stakeholder* memiliki berbagai kepentingan dan pengaruh masing-masing. Komunikasi menjadi jembatan berbagai kepentingan dan pengaruh para *stakeholder*. Sehingga makna komunikasi mengalami perubahan ke arah menyediakan fasilitas di antara *stakeholder* untuk menentukan masalah bersama. Namun, selama ini pihak yang paling terdampak karena kebijakan yang ada adalah masyarakat.

Kebijakan yang disampaikan oleh *key player* tentu akan berdampak pada *stakeholder* yang lain. Hal itu yang kemudian membuat masing-masing *stakeholder* melakukan kegiatan komunikasi sesuai kepentingannya, terutama masyarakat yang setiap hari berada di kawasan TNK. Sarwoprasodjo (2009) menjelaskan bahwa dalam mempersepsi suatu materi sosialisasi/komunikasi, masyarakat bersifat selektif karena dibatasi oleh filter fisiologis (daya ingat) dan filter psikologis (harapan terhadap lembaga pemerintahan sebagai sumber informasi dan pemecah masalah pembangunan).

Isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo awalnya diketahui masyarakat melalui media. Tidak ada jejak pendapat atau membangun aspirasi dari masyarakat. Bahkan pemerintah kabupaten tidak memberikan

penjelasan terhadap isu yang ada. “Belum lama ini, baru bulan Juli ini. Begitu kami dengar langsung gerak, di Facebook awalnya. Viral di sana, anak-anak tahu langsung kumpul-kumpul. Tidak ada himbauan dari pemerintah terus akhirnya pak bupati bilang begitu, berarti ada yang disembunyikan.” (HAK, Desa Komodo, 11/8/2019)

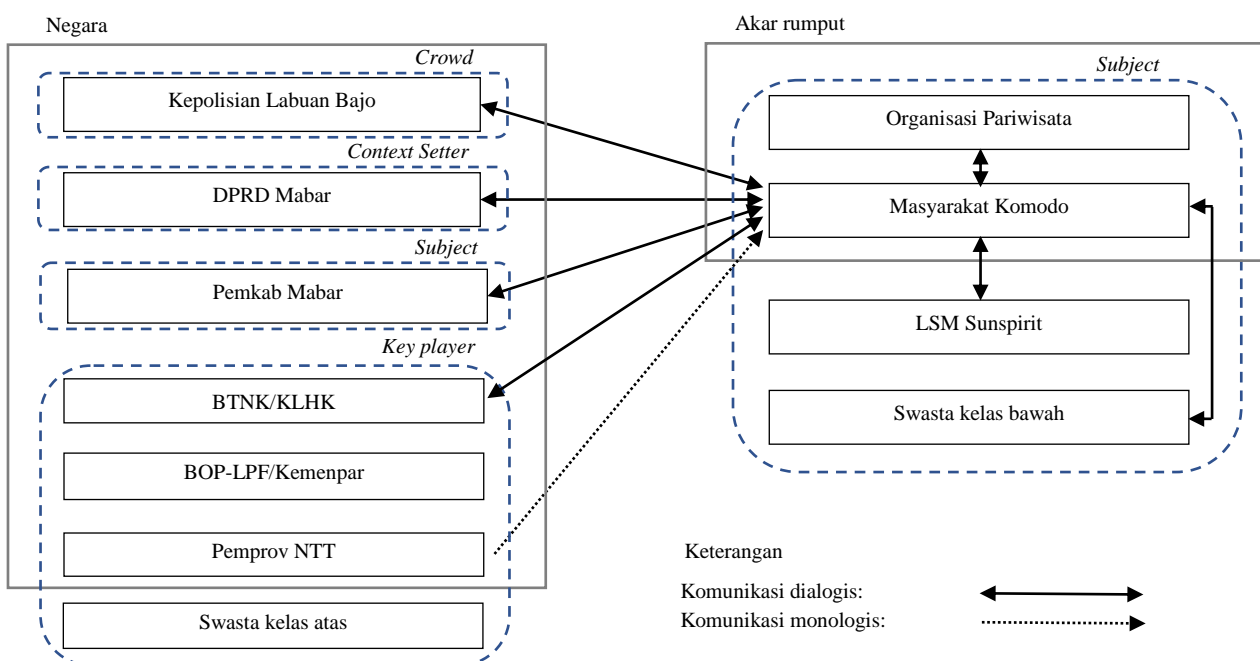
Selain itu, ikatan kuat antara masyarakat dengan hewan Komodo yang dianggap sebagai saudara melahirkan makna konservasi di masyarakat sendiri. Masyarakat menganggap tanah kelahiran dan Komodo sebagai saudara sehingga harus mereka lindungi. “Sejak dulu kami menjaga ini (Pulau Komodo dan Hewan Komodo). Nenek moyang kami mengajarkan kami tentang konservasi. Jika kami jahat, satu batang korek api bisa menghabiskan pulau ini. Tapi kami tidak melakukannya.” (AKB, Loh Liang, 25/8/2019)

Masyarakat berusaha mempertahankan diri dan desa karena mereka lahir dan melangsungkan kehidupan di Pulau Komodo. “Namanya kan ini kan kampung halaman kan. Gak mungkin lah kita biarkan itu. Ya kata saya gak mungkin, tapi gatau nanti pemerintah”. (AB, Loh Liang, 11/8/2019). Atas adanya isu tersebut, masyarakat melakukan gerakan perlawanan melalui strategi komunikasi. Cangara (2014) menyebutkan bahwa strategi komunikasi dilakukan melalui komunikasi yang dibangun dengan melihat komunikator, komunikan/target saran, pesan, media/alat/sarana komunikasi dan evaluasi. Analisis terhadap komunikator dan komunikan akan menjadi pembahasan dalam sub bab tersendiri. Pada sub bab ini komunikator utama adalah masyarakat yang menyampaikan pesan terhadap isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo, namun stakeholder lain dapat menjadi komunikator karena turut menyuarakan tentang isu tersebut. Analisis terhadap pesan dan saluran/media/alat/sarana komunikasi melalui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat menggunakan model SPEAKING Hymes.

Membangun Komunikasi dengan Stakeholder Lain

Pada isu penutupan pulau dan relokasi Masyarakat Komodo, masyarakat sebagai aktor utama dalam aktivitas komunikasi, karena mereka yang paling terdampak. Masyarakat membangun komunikasi dengan stakeholder lain seperti Pemerintah, LSM, dan Swasta. Komunikasi dengan stakeholder lain tersebut memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder serta tujuan utama masyarakat yaitu penolakan terhadap relokasi dan Penutupan Pulau Komodo.

Saat penelitian dilakukan, tidak semua aktivitas komunikasi dapat diamati secara langsung. Hanya aktivitas komunikasi saat terjadi demonstrasi kedatangan Tim Terpadu (terdiri dari BTNK, KSDAE, Pakar Pariwisata, Pemda Manggarai Barat, Kemitraan, BOP-LBF, Independen, Pemprov NTT, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM) dan pertemuan dengan BTNK dan Kepolisian Labuan Bajo. Komunikasi dengan stakeholder lain terjadi sebelum dan sesudah penelitian dilakukan. Seperti komunikasi dengan DPRD, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui aksi dan audiensi, Pemprov NTT melalui rencana audiensi dan sudah mengirimkan 3 surat permohonan audiensi.



Gambar 2. Komunikasi masyarakat dengan stakeholder lain

Gambar 2 menunjukkan komunikasi yang dibangun oleh komunikator bersama komunikan. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan membangun komunikasi dengan *stakeholder* lain secara satu arah (monologis) dan dua arah (dialogis). Tufte dan Mefalopulos (2009) membagi pendekatan komunikasi menjadi dua kategori yaitu komunikasi monologis dan komunikasi dialogis. Komunikasi monologis adalah pendekatan komunikasi satu arah dari komunikator seperti kampanye media, penyebaran informasi dan pendekatan difusi lainnya, sedangkan komunikasi dialogis merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah, dan berakhir pada ruang lingkup dan membahas isu-isu dan menghasilkan pengetahuan baru dan solusi, bukan hanya mengirimkan informasi.

Komunikasi dialogis dilakukan masyarakat dengan LSM *Sunspirit for Justice and Peace* (SJP). Komunikasi dialogis dengan LSM SJP dipengaruhi adanya kesamaan kepentingan keduanya. Komunikasi antara masyarakat dengan LSM SJP dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran kritis masyarakat agar memahami permasalahan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan TNK melalui kegiatan diskusi dan diseminasi publikasi hasil-hasil kajian. Informasi yang mengalir dari masyarakat kepada LSM SJP berkenaan dengan kondisi faktual yang terjadi pada masyarakat dalam konteks pengelolaan TNK.

Komunikasi dialogis juga dibangun masyarakat dengan Balai Taman Nasional Komodo/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BTNK/KLHK). Dalam konteks isu penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo, masyarakat menyampaikan kondisi mereka secara sosial, ekonomi, budaya, sementara BTNK/KLHK menyampaikan kebijakan/pandangan dalam isu tersebut. Masyarakat berusaha mempengaruhi dan menyampaikan aspirasi penolakan isu penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo melalui tiga peristiwa berikut: 1) demonstrasi pada 17 Juli 2019 di Kantor BTNK, Labuan Bajo; 2) pada 2 Agustus 2019, lima orang perwakilan masyarakat Desa Komodo menuju Jakarta dan beraudiensi kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK untuk menyampaikan penolakan atas rencana Gubernur NTT; dan 3) Aksi demonstrasi kedatangan Tim Terpadu KLHK. Aksi ini sangat penting dilakukan masyarakat untuk menggagalkan isu yang disampaikan Gubernur NTT. *“Apakah itu masih bisa, mudah-mudahan saja bisa, dengan wacana oleh pak Gubernur itu mungkin itu salah satu jalan keluarnya nanti, salah satu jalan tengah yang akan kita lakukan.”* (AB, Loh Liang, 11/8/2019). Bahkan, masyarakat menganggap gerakan yang mereka lakukan bernilai spiritual/sakral bagi mereka. Karena ketika masyarakat merasa terganggu oleh pihak lain, Komodo yang dianggap sebagai saudara, akan menampakkan diri. Sebagaimana yang pernah terjadi di demonstrasi sebelumnya di Labuan Bajo. Komodo juga terlihat di salah satu dermaga di Labuan Bajo. *“Jadi kenapa namanya, ritual. Seperti yang mereka omongkan kemarin di kantor DPRD itu (forum dengar pendapat di kantor DPRD). Ada Komodo terlihat di dermaga.”* (AB, Loh Liang, 11/8/2019)

Komunikasi Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan DPRD Manggarai Barat berlangsung dialogis. Kegiatan komunikasi diawali dari inisiasi gerakan masyarakat pada saat berdemonstrasi tanggal 17 Juli 2019 di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai Barat. DPRD Manggarai Barat memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. Masyarakat kemudian melanjutkan aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Manggarai dan Kantor DPRD pada 17 Juli 2019. Beberapa pernyataan sikap masyarakat antara lain: 1) menuntut Gubernur NTT untuk segera membatalkan rencana menutup Pulau Komodo dan memindahkan sebagian atau pun seluruh penduduk, 2) menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali pertanyaannya terhadap rencana penutupan Pulau Komodo, 3) menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas model pengembangan pariwisata di Kampung Komodo yang berpihak pada kepentingan masyarakat, 4) menuntut pihak BTNK untuk juga berpihak pada kepentingan Masyarakat Komodo di samping menjalankan fungsinya sebagai badan konservasi (Warga..., 2019).

Komunikasi dialogis dibangun masyarakat dengan Kepolisian Manggarai Barat/Labuan Bajo. Pada setiap aksi masyarakat, Kepolisian Manggarai Barat turut serta dalam pengamanan. Termasuk peristiwa komunikasi antara masyarakat dengan Kepolisian Labuan Bajo terjadi pada 15 Agustus 2019 dalam diskusi yang juga dihadiri oleh BTNK. Selain itu, saat aksi, masyarakat juga bersama swasta kelas bawah yang terhimpun pada organisasi pariwisata. Saat perencanaan dan pelaksanaan aksi, masyarakat dan swasta kelas bawah bersama-sama merumuskan dan menyampaikan tuntutan mereka. Swasta kelas bawah memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat Komodo dalam aktivitas ekonomi yang mereka bangun. Sehingga mereka sangat berkepentingan terhadap isu relokasi dan penutupan pulau.

Komunikasi monologis terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemprov NTT secara sepihak mengeluarkan pernyataan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Informasi penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo oleh Gubernur NTT kepada masyarakat disampaikan secara satu arah melalui saluran media massa. Tidak hanya menyampaikan mengenai rencana penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo, Gubernur NTT juga menyampaikan pernyataan kontroversial, antara lain: 1) Gubernur NTT menyebutkan masyarakat Komodo sebagai penduduk liar (Dale, 2020); 2) dalam wawancara Gubernur NTT menyebutkan “*It’s called Komodo Island, so it’s for the Komodo not for humans. There will be no human rights there, only animal rights*” (Henske & Wijaya, 2019). Masyarakat merespon pernyataan Gubernur NTT dengan mengirimkan surat audiensi kepada Gubernur NTT, namun Gubernur NTT tidak memenuhi permintaan audiensi tersebut. Kunjungan Gubernur NTT sebelumnya ke TNK untuk penataan kawasan dan pengembangan pariwisata, namun kenyataannya muncul wacana relokasi masyarakat. Dicurigai ada motif ekonomi atas wacana relokasi penduduk, karena Gubernur NTT memiliki latar belakang pengusaha. “*Pernah ke sini juga dia, dulu wacananya ini dia hanya ditata ulang dan dihidupkan lagi wisatanya, tapi merembet malah jadi relokasi. Karena dia sudah tau bahwa ada teluk intan di sini, kan dia seorang pengusaha*”. (JMN, Desa Komodo, 14/8/2019)

Pesan dan Media/Saluran Komunikasi Masyarakat

Media atau saluran komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada *stakeholder* lain (Cangara, 2014). Penyusunan pesan dilakukan dengan tetap melihat pada tujuan yang ingin dicapai oleh komunikator. Pesan bisa dalam bentuk simbol, ekspresi dan bahasa dalam serangkaian makna. Proses komunikasi digunakan sebagai bagian untuk menganalisis pesan dan media/saluran komunikasi yang dilakukan masyarakat. Analisis proses komunikasi masyarakat Komodo menggunakan model SPEAKING Hymes. Metode SPEAKING (*Setting, Participant, Ends, Act sequence, Key, Instrument, Norm, Genre*) digunakan untuk menganalisis peristiwa komunikasi dalam isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Model SPEAKING merupakan cara untuk menelusuri dan menjelaskan *stakeholder* dan tujuan-tujuan sosial yang terlihat dari cara mereka berkomunikasi (Hymes, 1974).

Dua peristiwa penting yang menjadi fokus pembahasan pada bagian ini yaitu *pertama*, aksi demonstrasi antara Masyarakat Komodo atas kedatangan Tim Terpadu di Desa Komodo Pulau Komodo. *Kedua*, diskusi BTNK, Kepolisian Labuan Bajo dan Masyarakat Komodo di Kantor BTNK Loh Liang, Pulau Komodo. Dua peristiwa ini penting dalam menggambarkan isu yang terjadi serta bagaimana komunikasi pembangunan memandang suatu kejadian di masyarakat. Selain itu, dua peristiwa ini penting sebagai media/sarana bagi masyarakat untuk mencapai kepentingannya.

Tabel 1. Analisis Komunikasi menggunakan metode SPEAKING

Komponen	Keterangan Peristiwa 1	Keterangan Peristiwa 2
<i>Setting</i>	Darmaga Desa Komodo. Peserta adalah Tim Terpadu dan Masyarakat Komodo. Peristiwa terjadi pukul 8.33-9.28 WITA (15/8/19).	Teras Kantor BTNK Loh Liang. Peserta pertemuan duduk melingkar. Pertemuan pukul 09.48-10.37 WITA (25/8/19)
<i>Participant</i>	Jumlah aktor yang terlibat adalah hampir seluruh Masyarakat Komodo dan Tim Terpadu.	Jumlah aktor yang terlibat sekitar 20 orang yaitu BTNK, Kepolisian Labuan Bajo dan Masyarakat Komodo.
<i>Ends</i>	Tim Terpadu bermaksud melakukan kajian, masyarakat menyampaikan penolakan relokasi dan penutupan Pulau Komodo.	Membahas isu relokasi dan penutupan TNK, masyarakat menaruh kecurigaan akan kedatangan Pemprov NTT dan Bappenas.
<i>Act sequence</i>	Pertemuan diawali oleh Kepala BTNK, sekaligus memperkenalkan anggota Tim Terpadu. Dilanjutkan dialog dengan masyarakat. Tidak ada penutupan dialog.	Pertemuan dibuka oleh Kepala BTNK, sekaligus menjadi moderator dalam pertemuan ini. Kemudian mendengarkan tanggapan dari peserta yang lain. Tidak ada penutupan secara resmi.

<i>Key</i>	Pertemuan sangat ramai dan penuh massa, dibalut dalam suasana aksi/demo. Terjadi sahut menyahut pendapat diantara peserta. Massa masyarakat selalu lantang menyampaikan pernyataan.	Pertemuan dilakukan dengan santai sekaligus menikmati kopi yang disiapkan oleh BTNK. Seluruh peserta pertemuan mendengarkan pihak yang berbicara dan dapat menanggapi langsung. Beberapa peserta menyampaikan tanggapannya dengan semangat dan tegas.
<i>Instruments</i>	Menggunakan Bahasa Indonesia. Frasa yang sering disampaikan seperti 'independen', 'menolak', 'tolak'	Menggunakan Bahasa Indonesia, sesekali Masyarakat Komodo menggunakan bahasa daerah. Frasa yang sering disampaikan seperti 'aspirasi', 'audiensi', 'harga diri'.
<i>Norm</i>	Suasana sangat ramai, tidak formal, tidak ada aturan waktu penyampaian dan tanggapan. Saat pembicara lain belum selesai, ada pemotongan pembicaraan oleh pihak lain.	Suasana dalam pertemuan tidak terlalu formal. Tidak ada pengaturan waktu untuk peserta memberikan tanggapan. Peserta berhenti berbicara ketika selesai menyampaikan pendapat dan tanggapannya.
<i>Genre</i>	Pertemuan berbentuk aksi/demonstrasi	Pertemuan berbentuk diskusi informal

Tabel 1 menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik bentuk komunikasi di kedua peristiwa. Peristiwa 1 merupakan puncak ketegangan antara masyarakat dengan pengelola TNK. Masyarakat yang berharap bahwa BTNK dengan tegas menolak isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo, tetapi kemudian membentuk Tim Terpadu. Masyarakat menyesalkan atas pembentukan Tim Terpadu yang seharusnya menjadi motor penggerak konservasi di TNK. Seakan-akan BTNK tidak memiliki sikap atas wacana yang ada.

“Yang kami ketahui konservasi itu sudah punya lembaga yang punya akuntabilitas, yaitu Balai Taman Nasional Komodo. Nah disini sekarang, jika di taman nasional komodo ini bermasalah, kenapa pihak BTNK tidak membantah wacana dari Pemprov ini. kenapa mengambil jalan tengah untuk membentuk Tim Terpadu?” (MK, Desa Komodo, 15/8/2019)

Dua peristiwa tersebut memiliki kondisi yang berbeda. Pada peristiwa 1, setting terjadi dalam yang tidak kondusif. Dialog terjadi berlangsung di dermaga ketika Tim Terpadu baru sampai di Pulau Komodo. Hal ini tidak sesuai dengan rencana bahwa diskusi akan dilaksanakan di kantor Desa Komodo. Meski Tim Terpadu berangsur menuju kantor Desa Komodo, massa mendorong mundur Tim Terpadu. Massa yang memenuhi dermaga menimbulkan suasana yang riuh dan hampir seluruh masyarakat mengekspresikan emosi kekecewaan, kesedihan dan kemarahan terhadap Tim Terpadu. Setting yang demikian menyebabkan sulitnya mencapai pemahaman atas pesan yang disampaikan. Pada peristiwa 2, ketegangan masyarakat sudah cenderung menurun dan berlangsung kondusif. Setting pertemuan tepat digunakan untuk pelaksanaan diskusi. Jumlah peserta yang tidak terlalu banyak membuat berbagai pihak dapat bergantian menyampaikan pendapat.

Tabel 2. *Act Sequence* Peristiwa 1 dan Peristiwa 2

Susunan acara	Peristiwa 1		Peristiwa 2	
	Pelaku	Isi pesan	Pelaku	Isi pesan
Pembukaan	P2	- Membuka dan menyampaikan tujuan kedatangan, dan siapa saja yang datang (dipotong P1).	P3	- Membuka pertemuan dengan mempersilahkan hadirin untuk menyampaikan pendapat.
			P4	- Menyampaikan tujuan yaitu silaturahmi dan menawarkan bantuan meneruskan aspirasi sesuai kapasitas P4.

Susunan acara	Peristiwa 1		Peristiwa 2	
	Pelaku	Isi pesan	Pelaku	Isi pesan
Diskusi	P1	- Mempertanyakan posisi BTNK, dan mengapa membentuk Timdu.	P3	- Mempersilakan P1 untuk memberikan pendapat. - Menyampaikan tujuan kedatangan.
	P2	- Keputusan Timdu dari Kementerian (Dirjen), menyampaikan tujuan, namun dipotong P1	P1	- Menyampaikan permasalahan. - Mempertanyakan solusi dari P4 - Menuntut Gubernur NTT meminta maaf dan klarifikasi (khususnya Gubernur NTT telah menyebutkan masyarakat Komodo sebagai penduduk liar).
	P1	- Mempertanyakan kembali tujuan, serta menuntut independensi Timdu.	P4	- P1 perlu lebih terbuka agar menemukan solusi terbaik.
	P2	- Tujuan Timdu untuk mendapat penguatan dari P1. - Kepala BTNK menjamin independensi P2. - P2 tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan.	P1	- Perlu pertemuan dengan pihak yang berwenang mengambil kebijakan.
			P3	- Mengakui kawasan TNK merupakan satu kesatuan antara satwa Komodo dan masyarakat.
	P1	- Meminta perwakilan Pemprov NTT mundur. - Meminta Timdu memakai baju penolakan penutupan P. Komodo - P2 dipersilahkan ke kantor desa Komodo, namun belum sampai masuk P1 mendesak P2 pulang. - Menyerahkan surat untuk Presiden dari anak-anak P1.	P1	- Menyampaikan kembali bahwa Masyarakat dan Komodo adalah saudara, sudah ada sejak sebelum Indonesia Merdeka - Masyarakat juga diakui sebagai warga negara.
	P2	- Tidak berkenan menggunakan kaos penolakan. - Memahami suasana kebatinan P1 - Menerima surat anak-anak P1	P3	- Mengakui masyarakat adalah satu kesatuan dengan kawasan - Pihak P1 juga mendata jumlah hewan Komodo di kawasan
Penutup	(Tidak ada penutupan dialog, P2 kembali ke Labuan Bajo)		P3	- Menutup pertemuan (secara tidak resmi)

Tabel 2 menunjukkan *Act Sequence* yang terjadi pada Peristiwa 1 dan Peristiwa 2. Pada peristiwa 1, mulanya terjadi perbedaan pemahaman dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa Tim Terpadu (P2) merupakan perwakilan Pemprov NTT dan berelasi dengan Gubernur NTT, sehingga ketika Tim Terpadu baru sampai di dermaga, sebagian massa menolak kedatangan Tim Terpadu. Sedangkan pada kenyataannya Tim Terpadu yang datang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur.

“Tim ini untuk mendengarkan, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Memang kemarin perwakilan masyarakat sudah ketemu dengan Pak Dirjen. Tapi, tim ini kan dari berbagai pihak, tidak hanya dari Pak Dirjen, ada dari Daerah, ada akademisi. Ada dari UGM, IPB, LSM, untuk

mendengarkan, untuk memberikan rekomendasi kepada Ibu Menteri”. (AW, Dermaga Desa Komodo, 15/8/2019)

Pada Peristiwa 2, Masyarakat Komodo (P1) menyuarakan aspirasi Warga Desa Komodo atas isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo kepada BTNK (P3) dan Kepolisian Labuan Bajo (P4). Penyampaian kepada P3 menunjukkan bahwa P3 menjadi *key player* dalam pengelolaan TNK. Peran P3 sebagai *key player* dapat dilihat dari kewenangannya mengatur jalannya diskusi dan menyampaikan kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan.

Peristiwa 2 juga menunjukkan bahwa P3 sudah mengakui bahwa keberadaan P1 sangat penting dalam pengelolaan TNK. Komunikasi dari 3 (tiga) *stakeholder* tersebut menunjukkan kemauan yang baik akan terwujudnya TNK sebagai kawasan konservasi yang tidak hanya melihat alam sebagai unsur utama, tetapi masyarakat sebagai unsur yang hidup dan berinteraksi langsung dengan kawasan TNK sebagai pariwisata. Karena mayoritas Masyarakat Komodo (60,36%) bekerja di sektor wisata (Kogeta, 2019 dikutip BTNK, 2019). Pendekatan partisipasi masyarakat sangat penting sebagai sebuah bagian utuh pembangunan pariwisata berkelanjutan (Okazaki, 2008). Masa depan kawasan TNK juga sangat tergantung dengan aktivitas (interaksi) masyarakat dengan SDA dalam kawasan.

Dua peristiwa komunikasi tersebut menggambarkan bahwa peristiwa 1 menunjukkan puncak ketegangan dalam masyarakat Komodo, sementara peristiwa 2 tensi ketegangan dalam masyarakat Komodo cenderung menurun. Meski pada peristiwa 1 tidak kondusif, pesan dan ekspresi yang ditunjukkan oleh masyarakat Komodo yang menolak relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo sangat kuat sehingga diterima oleh Tim Terpadu. Setelah dua peristiwa tersebut, Tim Terpadu menyusun rekomendasi kepada Menteri LHK bahwa tidak diperlukan adanya penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo. Kepentingan masyarakat akan penolakan wacana Gubernur NTT tentang penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo dapat dicapai. Namun, sebelum kepentingan tersebut terpenuhi, masyarakat perlu mengeluarkan usaha yang cukup besar dan perlu memobilisasi kekuatan kolektif di masyarakat, mengingat aspek komunikasi dalam pengelolaan TNK belum menjadi perhatian penting dalam strategi pengelolaan TNK. Meski kepentingan masyarakat dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo tercapai, namun dalam pengelolaan TNK di masa mendatang, sejumlah tantangan komunikasi masih muncul dengan adanya pertarungan kepentingan *stakeholder* yang masih berjalan.

KESIMPULAN

Stakeholder dalam pengelolaan TNK memiliki derajat kepentingan dan pengaruh yang berbeda, menyebabkan proses komunikasi *stakeholder* berjalan dinamis. Mayoritas pemerintah dan swasta (kelas atas) bertindak sebagai *key player*. LSM SJP, Masyarakat Komodo, Organisasi Pariwisata, dan Swasta (kelas bawah) sebagai *subject*. DPRD Mabur termasuk dalam *context setter*, sementara Kepolisian Labuan Bajo sebagai *crowd*. Pengaruh dan kepentingan ini yang mendasari strategi komunikasi masyarakat dengan *stakeholder* lain terhadap isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Hampir semua *stakeholder* melakukan komunikasi dialogis, hanya masyarakat dan Pemprov NTT sebagai *stakeholder* yang melakukan komunikasi monologis/searah. Sebagai upaya mencapai kepentingan, masyarakat membangun komunikasi dengan banyak *stakeholder* sebagai bentuk advokasi terhadap isu atau kebijakan rencana relokasi dan penutupan Pulau Komodo, namun posisi mereka dalam kondisi rentan.

Masyarakat membangun komunikasi dengan banyak pihak untuk mencapai kepentingannya. Aktivitas komunikasi yang dibangun masyarakat seperti demonstrasi saat Tim Terpadu melakukan kajian di Pulau Komodo dan diskusi setelah demonstrasi terjadi. Selain itu aktivitas komunikasi tersebut, masyarakat juga mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur NTT, beraudiensi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)-KLHK, serta berdemonstrasi di Labuan Bajo, yaitu DPRD Manggarai Barat, kantor Bupati Manggarai Barat, dan Kantor BTNK. Dua peristiwa komunikasi dalam isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo pada tahun 2019 dianalisis menggunakan metode SPEAKING. Pada Peristiwa 1 menunjukkan puncak ketegangan dalam masyarakat Komodo, sementara Peristiwa 2 tensi ketegangan dalam masyarakat Komodo cenderung menurun. Meski pada Peristiwa 1 tidak kondusif, pesan dan ekspresi yang ditunjukkan oleh masyarakat Komodo dapat

diterima oleh Tim Terpadu. Peristiwa yang terjadi menghasilkan rekomendasi bahwa tidak diperlu adanya penutupan pulau dan relokasi masyarakat. Kepentingan yang dimiliki masyarakat mampu dicapai sesuai tujuan, tetapi mereka perlu memobilisasi masyarakat dan usaha yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, H. Y. (2019). Kajian Teori Komunikasi Lingkungan Dalam Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Bessette, G. (2006). Facilitating dialogue, learning and participation in natural resource management. In G. Bessette (Ed.), *People, Land and Water: Participatory Development Communication for Natural Resources Management*. London: Earthscan. <https://doi.org/10.1080/15330150590934480>
- Bonsu, N. O., McMahon, B. J., Meijer, S., Young, J. C., Keane, A., & Dhubháin, Á. N. (2019). Conservation conflict: Managing forestry versus hen harrier species under Europe's Birds Directive. *Journal of Environmental Management*, 252(April). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109676>
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Thrid World Political Ecology*. London: Routledge.
- BTNK. (2019). *Data dan Informasi Kajian Kemungkinan Penutupan Sementara Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo*. Labuan Bajo.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan Strategi Komunikasi* (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cox, T. R., Butler, J. R. A., Webber, A. D., & Young, J. C. (2020). The ebb and flow of adaptive co-management: A longitudinal evaluation of a conservation conflict. *Environmental Science and Policy*, 114, 453–460. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.09.017>
- Dale, C. J. P. (2020, March 12). Pariwisata Super Premium dan Penguasaan Sumber Daya di Flores. *Indoprogress*. Retrieved from <https://indoprogress.com/2020/03/pariwisata-super-premium-dan-penguasaan-sumber-daya-di-flores/>
- Eden, C., & Ackermann, F. (2007). Making Strategy: The Journey of Strategic Management. *European Journal of Operational Research*, 176(2), 1294–1297. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.02.002>
- Freeman. (2015). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- Glasbergen, P. (1995). *Managing Environmental Disputes: Network Management as an Alternative*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Grimble, R. (1998). *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management*. Chatam: Natural Resource Institute. Retrieved from <http://www.nri.org/publications/bpg/bpg02.pdf>
- Henske, R., & Wijaya, C. (2019). The Fight for Dragon Island.
- Hodgson, I. D., Redpath, S. M., Fischer, A., & Young, J. (2019). Who knows best? Understanding the use of research-based knowledge in conservation conflicts. *Journal of Environmental Management*, 231(September 2018), 1065–1075. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.023>
- Hymes, D. (1974). *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Juerges, N., Leahy, J., & Newig, J. (2020). A typology of actors and their strategies in multi-scale governance of wind turbine conflict within forests. *Land Use Policy*, 96(May 2019), 104691. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104691>
- Kusumedi, P., & Rizal HB, A. (2010). Analisis Stakeholder Dan Kebijakan Pembangunan Kph Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179–193. <https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.179-193>
- Lubis, S. (2018). Komunikasi Dialogis Landasan Masyarakat Demokrasi. *CommuniqUE*, 1(1), 1–6.
- MacKeracher, T., Diedrich, A., Gurney, G. G., & Marshall, N. (2018). Who trusts whom in the Great Barrier Reef? Exploring trust and communication in natural resource management. *Environmental Science and*

Policy, 88(February), 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.06.010>

- Madden, F., & McQuinn, B. (2014). Conservation's blind spot: The case for conflict transformation in wildlife conservation. *Biological Conservation*, 178(2014), 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.015>
- Margles, S. W., Peterson, R. B., Ervin, J., & Kaplin, B. A. (2010). Conservation without borders: Building communication and action across disciplinary boundaries for effective conservation. *Environmental Management*, 45(1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s00267-009-9383-8>
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ekayani, M. (2006). *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan: Teori dan Implementasi*. Bogor: IPB Press.
- ODA. (1995). *Guidance note on how to do stakeholder analysis of AID project and programmes*.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.2167/jost782.0>
- Perpres. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, Pub. L. No. Perpres No 38/2018 (2018).
- PP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (2011). Indonesia.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rosary, E. de. (2019, July 31). Ini Dampak Rencana Penutupan Pulau Komodo Bagi Warga dan Wisatawan. *Mongabay*.
- Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., & Nurrochmat, D. R. (2012). Stakeholders analysis on the management of danau sentarum national park kapuas hulu regency, West Kalimantan. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(2), 78–85. <https://doi.org/10.7226/jtjm.18.2.78>
- Sabir, L. O., Avenzora, R., & Winarno, G. D. (2018). Persepsi Stakeholder untuk Pembangunan Ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo. *Media Konservasi*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.29244/medkon.23.1.1-8>
- Sarwoprasodjo, S. (2009). Efektivitas Iklan Politik Humas Departemen Pertanian: Politik Pencitraan atau Pembentukan Ruang Publik? *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 03(03), 283–298.
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Satria, A., Muthohharoh, N. H., Suncoko, R. A., & Muflikhati, I. (2017). Seaweed farming, property rights, and inclusive development in coastal areas. *Ocean and Coastal Management*, 150, 12–23. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.09.009>
- Scheffran, J. (2006). Tools for stakeholder assessment and interaction. In S. Stoll-Kleemann & M. Welp (Eds.), *Stakeholder Dialogues in Natural Resources Management: Theory and Practice* (p. 386). Berlin: Springer.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Strzelecka, M., Rechciński, M., Tusznio, J., Akhshik, A., & Grodzińska-Jurczak, M. (2021). Environmental justice in Natura 2000 conservation conflicts: The case for resident empowerment. *Land Use Policy*, 107, 105494. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105494>.
- Susilo, M. E., Prayudi, & Erawati, H. (2016). Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 122–135.
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Participatory communication: A practical guide*.
- UU. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990). Indonesia.

Wacana penutupan Taman Nasional Komodo: Apakah Pulau Komodo dan Labuan Bajo menghadapi ancaman pariwisata massal? (2019, July 22). *BBC News Indonesia*.

Warga Labuan Bajo Demo Tolak Rencana Penutupan Pulau Komodo. (2019, July 17). *Kompas.Com*.